

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Norwegia merupakan negara dengan kebijakan perubahan iklim yang ambisius dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Norwegia secara aktif melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan salah satunya melalui skema REDD+. Pada tahun 2010, kerja sama Norwegia-Indonesia dalam skema REDD+ dibentuk dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dari aktivitas deforestasi dan degradasi hutan. Hingga saat ini, capaian tujuan kerja sama belum tercapai/gagal. Namun, kegagalan tersebut tidak menjadikan Norwegia untuk menghentikan kerja sama, melainkan tetap melanjutkan kerja sama REDD+ tersebut. Keberlanjutan kerja sama Norwegia-Indonesia dalam skema REDD+ ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam perspektif ekonomi politik, keberlanjutan kerja sama ini setidaknya dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor, diantaranya; Pengetahuan publik tentang ancaman perubahan iklim, Tingkat demokrasi, Kekuatan lobi industri intensif karbon, Kapasitas administrasi negara, Per kapita dan total emisi CO<sub>2</sub>, dan Komitmen internasional.

Pengetahuan publik Norwegia tentang ancaman perubahan iklim dinilai sangat baik dengan tingkat transparansi dan aksesibilitas publik terhadap informasi perubahan iklim sangat tinggi. Baiknya pengetahuan publik Norwegia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan tersier, kebebasan media, dan kerentanan Norwegia terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, hal ini mendorong masyarakat untuk bertindak secara politis dan menjadi katalisator dalam mengontrol kebijakan pemerintah Norwegia terkait masalah perubahan iklim.

Tingkat demokrasi Norwegia memiliki kualitas demokrasi yang baik. Saat ini, dalam parlemen Norwegia terdapat 4 partai politik yang memiliki kepentingan dalam isu lingkungan (perubahan iklim). Dengan adanya tingkat demokrasi yang baik dan kepentingan publik terhadap isu lingkungan, ini memberikan efek positif dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim.

Administrasi negara (birokrasi) Norwegia dinilai berjalan dengan baik. Sistem administrasi negara Norwegia yang baik ini didukung dengan kapabilitas birokrat yang handal, sehingga proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik mampu berjalan harmonis karena adanya koordinasi dan kompromi baik dengan politisi maupun sesama birokrat antar lintas kementerian / sektor. Faktor per kapita dan / atau total emisi CO<sub>2</sub> tidak mempengaruhi Norwegia untuk mengadopsi kebijakan perubahan iklim. Adanya kebijakan perubahan iklim Norwegia lebih dikarenakan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan domestik bukan karena tanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang dihasilkan.

Kekuatan lobi industri intensif karbon merupakan penentu terpenting dalam kebijakan perubahan iklim. Industri minyak bumi dan gas alam (migas) merupakan motor fundamental ekonomi negara Norwegia. Adanya kebijakan perubahan iklim mengharuskan emisi gas rumah kaca pada industri migas dikurangi dan hal ini mengancam keberlangsungan eksistensi industri migas Norwegia. Agar kebijakan perubahan iklim tidak merugikan ekonomi, Norwegia mengimplementasikan skema REDD+. Keterlibatan aktif Norwegia dalam skema REDD+ dipengaruhi adanya difusi kebijakan internasional dan efek komitmen. Serta, bagian dari upaya untuk mendapatkan kredibilitas dari masyarakat

internasional. Dengan demikian, proyek implementasi pengurangan emisi gas rumah kaca yang seharusnya dilakukan di lingkup domestik, dipindahkan ke lingkup global.

Dari ke-6 (enam) faktor diatas, faktor kekuatan lobi industri intensif karbon dan komitmen internasional merupakan dua determinan dan paling berpengaruh dalam keberlanjutan kerja sama REDD+ Norwegia-Indonesia. Faktor kekuatan lobi industri intensif karbon memberi pengaruh dalam merumuskan dan menentukan jenis mekanisme yang digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan, faktor komitmen internasional berpengaruh dalam memberikan bias terhadap jenis mekanisme yang digunakan, serta guna melindungi kepentingan domestik Norwegia.

## 5.2. Saran

Asumsi perspektif ekonomi politik bahwa adanya interaksi timbal balik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Temuan dalam penelitian ini adalah keberlanjutan kerja sama REDD+ Norwegia-Indonesia dilatar belakangi kepentingan ekonomi Norwegia. Untuk melengkapi penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya, akan lebih menarik untuk meneliti kepentingan politik Norwegia dalam menginisiasi mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca. Bagi Pemerintah Indonesia, penelitian ini dapat menjadi referensi terkait proses pembuatan kebijakan khususnya kebijakan lingkungan (iklim).

